

Nama : Agnes Yuhestifiani
NPM : 2213031045
Mata Kuliah : Ekonomi Industri

CASE STUDY

1. Analisislah kemungkinan penyebab kegagalan implementasi kebijakan Making Indonesia 4.0 dalam mendorong pertumbuhan industri prioritas. Gunakan teori-teori kebijakan industri sebagai dasar analisis Anda.

Jawab:

Kegagalan implementasi Making Indonesia 4.0 kemungkinan berakar pada *mismatch* antara desain kebijakan dan kapasitas institusional ekosistem industri yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Teori kebijakan industri menekankan pentingnya koordinasi negara swasta, pemilihan aktivitas (bukan sekadar sektor), insentif yang berbasis produktivitas, serta governance yang adaptif dan berdisiplin “sunset” pada intervensi yang tidak efektif. Dalam praktik, Indonesia cenderung menetapkan target dan daftar prioritas yang luas tanpa memetakan *gap baseline*, *value proposition* per aktivitas (misalnya otomasi lini tertentu, komponen kritis, atau standardisasi kualitas), dan kesiapan faktor produksi (energi/logistik mahal, bahan baku tak terintegrasi, keterampilan teknis rendah). Kelemahan dalam *feasibility* berbasis bisnis (*cost-value added-market*), lemahnya orkestrasi rantai pasok (*supplier development*, *quality-cost-delivery*), dan minimnya pembiayaan investasi produktif (kredit *long-term*, *tax instruments pro-capex*) membuat kebijakan berakhir normatif. Selain itu, implementasi teknologi 4.0 cenderung “*technology-push*” (*pilot*, *showcase*) alih-alih “*problem-pull*” yang memecahkan *bottleneck* nyata di pabrik dan jaringan pemasok, sementara monitoring dan evaluasi berbasis produktivitas/ekspor tidak konsisten sehingga *learning-by-doing* kebijakan tidak terjadi.

2. Bandingkan pendekatan kebijakan industri Indonesia dengan negara lain seperti Vietnam atau Korea Selatan. Apa yang membedakan efektivitas kebijakan mereka?

Jawab:

Dibanding Indonesia, Vietnam mengoptimalkan strategi industrialisasi berbasis integrasi rantai pasok global dengan disiplin kebijakan lokasi (klaster industri), logistik, dan insentif fiskal yang tajam untuk aktivitas bernilai tambah (perakitan, komponen, EMS), disertai kemitraan FDI *supplier* lokal yang diberi dukungan kualitas dan pembiayaan. Korea Selatan

mencontohkan “*investment-driven*” *industrial policy*: negara bertindak sebagai mediator/fasilitator, menurunkan biaya modal (alokasi kredit, jaminan), menyiapkan infrastruktur dan human capital, serta menegakkan tata kelola yang ketat dengan indikator keberhasilan jelas; intervensi berakhir jika tidak produktif. Yang membedakan efektivitas mereka adalah fokus pada *activity-based targeting* (apa yang dikerjakan di pabrik/klaster), konsistensi institusi (*single window* yang benar-benar bekerja), pembiayaan jangka panjang untuk kapasitas produktif, dan *governance* yang memungkinkan koordinasi lintas lembaga tanpa fragmentasi. Indonesia sering berhenti pada deklarasi sektor prioritas dan peta jalan, tetapi kurang menutup “biaya ekosistem” (energi, logistik, lahan, data standar), kurang mengikat komitmen FDI ke upgrading pemasok domestik, dan belum menegakkan mekanisme evaluasi yang mendorong akuntabilitas hasil.

3. Berdasarkan hasil analisis Anda, rancanglah kebijakan industri alternatif yang lebih kontekstual untuk Indonesia agar mampu keluar dari jebakan deindustrialisasi dini. Jelaskan rasional dan instrumen kebijakan yang digunakan.

Jawab:

Kebijakan alternatif yang lebih kontekstual adalah *industrial policy* berbasis aktivitas dan klaster yang menutup gap biaya ekosistem, mengikat upgrading pemasok, dan menggerakkan pembiayaan produktif. Rasionalnya: keluar dari deindustrialisasi dini menuntut turunnya biaya produksi (energi/logistik), naiknya produktivitas (otomasi terarah, standar mutu), dan perluasan pasar (integrasi GVC) secara simultan. Instrumen kunci:

- a) *Activity-targeted incentives super-deduction* untuk investasi mesin/otomasi pada lini prioritas, dengan syarat kenaikan produktivitas dan sertifikasi mutu;
- b) *Supplier upgrading compact* setiap fdi mendapat insentif bila mencapai rasio substitusi impor dan jumlah pemasok lokal tersertifikasi;
- c) *Industrial cluster contracts* kontrak kinerja kawasan (energi reliabel, tarif industri kompetitif, layanan pelabuhan/kereta) dengan pmn/ppp untuk utilitas;
- d) Program pembiayaan investasi jangka panjang berbasis hasil (*productivity-linked loans*) melalui penyaluran kredit dan jaminan;
- e) *Human capital* cepat guna *bootcamp operator*, teknisi, dan *quality engineers* berbasis kebutuhan klaster (kurikulum bersama industri);

- f) *Strict sunset and m&e* indikator berkala (tfp, ekspor, rasio impor bahan antara), dengan penghentian insentif bila tidak tercapai.

Mulai dari lima klaster konkrit (f&b, tekstil–garment, komponen otomotif, ems elektronik, kimia dasar) di lokasi dengan kesiapan infrastruktur, lalu skala bertahap mengikuti capaian produktivitas dan integrasi rantai pasok.